

KEADILAN DISTRIBUSI ENERGI DAN KELANGKAAN BBM DI BENGKULU

¹Setyabudi Daryono, ²Rizki Amanda

¹Ekonomi Syariah, STAI La Tansa Mashiro, Lebak, Banten

²Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

¹setyabudi@gmail.com, ²rizkyamanda21kth@gmail.com

ABSTRAK

Kelangkaan BBM menjadi sorotan publik karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan distribusi barang. Artikel ini mengkaji fenomena kelangkaan BBM di Bengkulu dan pandangan ekonomi Islam yang fokus pada prinsip kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*) serta peran negara dalam pengelolaan kebutuhan vital rakyat. Artikel ini juga membandingkan kasus kelangkaan BBM di beberapa wilayah lain di Indonesia seperti Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur, untuk memberikan gambaran sistemik tentang lemahnya distribusi energi nasional. Data diambil dari beberapa dokumen yang terpublis di media massa. Hasil kajian menunjukkan bahwa distribusi BBM yang tidak merata dan kurangnya kontrol negara bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam, serta menunjukkan perlunya reformasi sistem distribusi energi yang berbasis syariah dan berpihak kepada kemaslahatan rakyat banyak.

Kata Kunci: Kelangkaan BBM, Keadilan Distribusi, Kepemilikan Umum, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Fuel scarcity is in the public spotlight because it has a direct impact on economic activities, people's purchasing power, and the distribution of goods. This article examines the phenomenon of fuel scarcity in Bengkulu and the view of Islamic economics that focuses on the principle of public ownership (*al-milkiyyah al-'ammah*) and the role of the state in managing the vital needs of the people. This article also compares the cases of fuel scarcity in several other regions in Indonesia such as West Kalimantan and East Nusa Tenggara, to provide a systemic picture of the weak national energy distribution. The data was taken from several documents published in the mass media. The results of the study show that the uneven distribution of fuel and the lack of state control are contrary to the values of justice in Islam and show the need to reform the energy distribution system that is based on sharia and is in favor of the benefit of the people.

Keywords: Fuel Scarcity, Distribution Justice, Public Ownership, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Energi merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) sangat memengaruhi kestabilan harga barang, transportasi, serta kesejahteraan masyarakat (Ibrahim, 2021; Ihwanudin et al., 2024; Zaki et al., 2024). Ketergantungan tinggi terhadap impor BBM dan fluktuasi harga minyak dunia sering kali menimbulkan kerentanan ekonomi, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Ketika harga minyak internasional naik, beban subsidi energi meningkat dan memaksa pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dalam negeri. Dampaknya, terjadi efek domino terhadap harga-harga kebutuhan pokok, biaya produksi, dan ongkos transportasi, yang akhirnya menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Fenomena kelangkaan BBM di Provinsi Bengkulu telah menimbulkan keresahan, terutama di kalangan nelayan, petani, dan pelaku UMKM (DIRWAN, 2015; Salim, 2018). Antrean panjang di SPBU, praktik penimbunan, dan distribusi yang tidak merata memperburuk kondisi. Faktor utama yang memicu kelangkaan BBM di Bengkulu antara lain keterlambatan pasokan dari depot utama, lemahnya infrastruktur distribusi, dan adanya penyimpangan dalam rantai distribusi—seperti praktik penimbunan dan penyalahgunaan oleh oknum tertentu. Selain itu, minimnya transparansi dan keterlibatan publik dalam pengawasan distribusi BBM turut memperburuk kondisi. Nelayan terpaksa mengurangi frekuensi melaut karena sulit mendapatkan solar, sementara petani kesulitan mengoperasikan mesin pertanian. Pelaku UMKM pun mengalami hambatan dalam produksi dan distribusi barang karena keterbatasan pasokan dan tingginya biaya operasional (Dakhoir, 2018).

Situasi ini menunjukkan lemahnya distribusi dan pengawasan, serta kurangnya jaminan negara terhadap ketersediaan energi di daerah. Negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin akses energi yang terjangkau, merata, dan berkelanjutan. Energi bukan semata komoditas ekonomi, tetapi juga hak dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh negara melalui sistem distribusi yang adil dan kepemilikan publik atas sumber daya strategis. Kebijakan energi yang berpihak pada kepentingan rakyat akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Situasi ini menuntut telaah lebih dalam dari pandangan ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan kolektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk melihat fenomena kelangkaan BBM di Bengkulu. Informasi dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer, serta analisis berita dan laporan dari media massa terpercaya terkait kelangkaan BBM di Bengkulu. Ada observasi sederhana ketika penulis di lapangan menghadapi fenomena ini. Analisis dilakukan dengan cara pembacaan yang berulang-ulang atas teks dan konteks sehingga bisa dirumuskan point-point sebagaimana tersaji dalam artikel ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian konsep dan praktik distribusi energi yang terjadi di lapangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam hal kepemilikan umum dan distribusi keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembacaan atas fenomena kelangkaan BBM di Bengkulu menciptakan berbagai dampak negatif, antara lain sebagai berikut: (1). Antrean panjang di SPBU dan waktu produktif masyarakat terbuang; (2). Munculnya praktik penimbunan dan distribusi yang tidak adil; (3). Harga-harga barang naik termasuk biaya logistik menjadi tinggi. Antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan yang lazim di berbagai wilayah Bengkulu, terutama saat pasokan BBM tersendat. Masyarakat rela menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan sejak dini hari, demi memperoleh BBM, baik untuk keperluan pribadi maupun usaha. Kondisi ini tidak hanya menyita waktu dan tenaga, tetapi juga menurunkan produktivitas masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup dari aktivitas harian seperti nelayan, petani, pengemudi ojek, hingga pelaku UMKM.

Pertamina (2024) memberikan data distribusi BBM subsidi untuk wilayah Bengkulu mengalami penurunan 8,4% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara kebutuhan masyarakat meningkat akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Ketapang dan Melawi, di mana antrean panjang terjadi akibat distribusi BBM yang lambat dan tidak merata. Media lokal (Pontianak Post, 2024) melaporkan bahwa masyarakat sampai harus bermalam di SPBU demi mendapatkan BBM. Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, para nelayan di Kabupaten Rote Ndao kesulitan melaut karena BBM jenis solar tidak tersedia di beberapa SPBU selama berminggu-minggu.

Sistem ekonomi Islam memandang hal ini sebagai cermin kegagalan negara yang menerapkan kapitalisme dalam menjamin pengelolaan kepemilikan umum yang adil (Hasbiullah, 2007; Malkawi, 2020; Supriyanto, 2009; Turner et al., 2001). QS. Al-Hasyr: 7 memberikan prinsip bahwa harta milik publik (termasuk BBM) harus dikelola negara dan didistribusikan secara merata agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (2013) dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menjelaskan bahwa barang kebutuhan vital masyarakat seperti air, energi, dan bahan bakar adalah milik umum dan pengelolaannya wajib berada di tangan negara untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat, bukan untuk dikomersialisasi. Oleh karena itu, pengelolaan BBM seharusnya tidak diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang cenderung memihak kepentingan pemodal besar. Untuk mewujudkan distribusi energi yang adil dan sesuai syariah, maka diperlukan:

1. Penguatan peran negara dalam distribusi BBM, termasuk pengawasan ketat terhadap SPBU dan agen penyalur.
2. Penegakan hukum terhadap praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi.
3. Reformulasi kebijakan subsidi berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar hitungan fiskal.
4. Pendekatan berbasis maqashid syariah dalam pengelolaan sumber daya energi nasional.

KESIMPULAN

Kelangkaan BBM di Bengkulu dan wilayah lain seperti Kalimantan Barat dan NTT mencerminkan lemahnya peran negara dalam mengelola sumber daya publik secara adil. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan distribusi dan larangan monopoli atas kepemilikan umum. QS. Al-Hasyr: 7 menjadi dasar bahwa kekayaan publik tidak boleh hanya berputar di kalangan elit, namun harus menjangkau semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan sistem distribusi energi nasional yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah dan keberpihakan kepada rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, T. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*.
https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf
- Dakhoir, A. (2018). Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(1), 31. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.783>
- DIRWAN. (2015). *KELANGKAAN, TEORI NILAI DAN TEORI HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Kapitalisme) Tesis*.
- Hasbiullah. (2007). Krisis Ekonomi Global Dan Kegagalan Kapitalisme. *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 123–128.
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Ihwanudin, N., Alfinuri, N., Vientiany, D., Utomo, Y. T., Fauzi, U., Wicaksono, A. T. S., Muyassarrah, Pambekti, G. T., Syakur, R. R. F., & Herviani, S. (2024). *BUKU AJAR SISTEM EKONOMI ISLAM* (A. Syahputra (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Malkawi, M. (2020). *Fall of Capitalism and Rise of Islam*.
<https://www.researchgate.net/publication/283422687>
- Salim, N. (2018). KELANGKAAN : KRITIK TERHADAP KAPITALIS (Refleksi Menuju Ekonomi Syariah). *Jurnal Ummul Qura*, XI(1), 2580–8109.
- Supriyanto. (2009). Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 6(November), 192–205.
- Turner, R. K., Bateman, I. ., & Adger, W. N. (2001). *Economics of Coastal and Water Resources*

Valuing Environmental Functions (Vol. 3, Issue 1). Springer Science.

Zaki, M., Asmara, A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Dahliana, D., Sauri, S., Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qamaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra Media Society.

Al-Qur'an al-Karim

Mannan, M.A. (1992). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Wakaf.

Antonio, M. Syafii. (2001). *Bank Syariah: Teori dan Praktek*. Gema Insani Press, Jakarta.

Republika.co.id & Kompas.com (2025). *Berita tentang kelangkaan BBM di Bengkulu*.

Pontianak Post (2024). *Laporan lapangan kelangkaan BBM di Kalimantan Barat*.

Pos Kupang (2024). *Kelangkaan BBM dan dampaknya terhadap nelayan di Nusa Tenggara Timur*.

Pertamina Report (2024). *Statistik distribusi BBM nasional*.